

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- , 2020. *Perbuatan Hukum Pemerintahan*. Phinatama Media. Makassar.
- Bagir Manan. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press. Cet. 2. Yogyakarta.
- Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Eny Kusdarini. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press. Yogyakarta.
- Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia. 2019. *Penjabat Kepala Daerah*. Thofa Media. Yogyakarta.
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs dan Diani Indah Rachmitasari. 2013. *Memahami Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta.
- Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *konsitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Joko Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Josef Mario Moteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka yustisia. Yogyakarta.
- Moch Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Muh. Hasrul dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2017. *Urgensi Staf Ahli Kepala Daerah*. Litera. Yogyakarta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Priyatmanto Abdoellah. 2016. *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Riant Nugroho. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai Fifth Estate. Metode Penelitian Kebijakan*, Ellex Media Komputindo. Jakarta.
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada Cet. 16. Depok.
- Romi Librayanto. 2013. *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*. Arus Timur. Makassar.
- S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Sri Hartini. Setiajeng Kadarsih. Dan Tedi Sudrajat. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah; Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika Cet. 1. Jakarta.
- Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. 2010. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta.

Jurnal:

- Arini Nur Annisa. Mutiah Wenda Juniar. Rismawati Nur. Dan Muh. Ramadhansyah Prasetia. 2022. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja Rumah Tangga Pada Masa Transisi". Awang Long Law Review, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Dewi Triwahyuni. 2015. "Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Sawala Jurnal Administrasi Negara. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.

- Firzhal Arzhi Jiwantara, Karmal Maksudi, dan Azrul Azwar. 2020. "Keputusan Sebagai Norma Penutup Dalam Instrumen Hukum Pemerintahan". Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Padangsidimpuan.
- Hidayat pratama Putra. 2020. "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan". Jurnal Hukum Peratur
- Imam Sukadi. 2020. "Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia". Mimbar Keadilan. Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.
- Lukman Hakim. 2011. "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Widyagama. Malang.
- Munsharif Abdul Chalim dan Faisal Farhan. 2015. "Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia". Jurnal Pembaharuan Hukum. Fakultas Hukum UNISSULA. Semarang.
- Solechan. 2015. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik". Administrative Law & Governance Journal. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Syukron Salam. 2018. "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa". Jurnal Nurani Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Tauhid dan Gufran. 2019. "Intervensi Politik Dalam Mutasi Pejabat Birokrasi Pemerintah Kota Bima". Jurnal Administrasi Negara. STISIP Mbojo. Bima.

Skripsi:

- Devi Adelia Mutiah. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer II-16 Makassar NO. 66-k/pm. II-16/AU/IX/2019)". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Internet:

CNN Indonesia. 2022 "Ombudsman Temukan 3 Maladministrasi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220719171934-20-823476/ombudsman-temukan-3-maladministrasi-penunjukan-pj-kepala-daerah>

Dewi Nurita. 2022. "Soal Keamanan Jadi Alasan Mendagri Pilih Brigjen TNI Andi Chandra Jadi Pj Bupati". <https://nasional.tempo.co/read/1596741/soal-keamanan-jadi-alasan-mendagri-pilih-brigjen-tni-andi-chandra-jadi-pj-bupati>

Majalah Mahkamah Konstitusi. 2017. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_129_1.%20Edisi%20Agustus%202017%20.pdf

Nanda Perdana Putra. 2022. "Headline: Perwira Aktif TNI-Polri jadi Penjabat Kepala Daerah, Kembalinya Dwifungsi?". <https://www.liputan6.com/news/read/4971433/headline-perwira-aktif-tni-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-kembalinya-dwifungsi>

Perludem. 2022. "Perludem Kritik Penunjukan Anggota TNI Aktif Menjadi PJ Kepala Daerah". <https://perludem.org/2022/05/25/perludem-kritik-penunjukan-anggota-tni-aktif-menjadi-pj-kepala-daerah/>

Rifqynizami Karyasuda. 2022. "Problematika Pilkada Pada November 2024". <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/15/problematika-pilkada-pada-november-2024>

Sri Utami. 2022. "Penunjukan Brigjen Andi Jadi PJ Bupati Bertentangan dengan UU TNI". <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/494523/penunjukan-brigjen-andi-jadi-pj-bupati-bertentangan-dengan-uu-tni>

Siti Fatimah. 2022. "Ombudsman Temukan 3 Maladministrasi pengangkatan Pj Kepala Daerah". <https://www.ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-temukan-3-maladministrasi-proses-pengangkatan-pj-kepala-daerah>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota